

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
INTISARI.....	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum tentang Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah..	17
1. Pengertian Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah	17
2. Susunan Keanggotaan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah	18
3. Pembinaan	19
4. Pengawasan	19
5. Kode Etik PPAT	19
6. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT	20
B. Tahapan Pemeriksaan dugaan Pelanggaran Jabatan PPAT.....	20
C. Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.....	23
D. Subjek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.....	25
1. Penggugat.....	25
2. Tergugat.....	26
E. Perdamaian Menghentikan Perkara yang sedang Berlangsung	26
F. Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik	27
G. Fungsi Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik.....	28
H. Macam-macam Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik.....	29
I. Pengertian Badan Pertanahan Nasional	36

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Sifat Penelitian	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Sifat Penelitian	41
B. Cara Pengumpulan Data.....	42
1. Data Primer	42
2. Data Sekunder	43
C. Subjek Penelitian.....	44
D. Alat dan Teknik Penelitian	45
1. Alat Pengumpulan Data	45
2. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Analisis Data	46
F. Tahapan Penelitian	48
G. Kendala dalam Penelitian dan Cara Mengatasinya.....	49
1. Kendala Penelitian	49
2. Cara Mengatasi Kendala Penelitian	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Pertimbangan Hakim menyatakan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah melanggar Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik	50
1. Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 20/G/2020/PTUN.PBR	50
2. Putusan PTTUN Medan Nomor 10/B/2021/PTTUN-MDN	53
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 337/K/TUN/2021.....	54
B. Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik dalam tahapan Pemeriksaan dan Penegakan Hukum atas Pelaksanaan Jabatan PPAT	57
1. Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik dalam penerapannya oleh MPPD.....	57
2. Tahapan Pemeriksaan dugaan Pelanggaran PPAT.....	62
3. Hasil Pemeriksaan MPPD Kabupaten Rokan Hulu	64
4. Kewenangan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah.....	67
5. Sanksi terhadap Pelanggaran Jabatan PPAT.....	69
C. Perdamaian Para Pihak dan Penghentian Pemeriksaan atas Pengaduan Pelanggaran	70
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78